



MESKI TERINTEGRASI JKN

2019, Jamkesda Tetap Dialokasikan

YOGYA (KR) - Pemkot dan DPRD Kota Yogya menyepakati tetap mengalokasikan anggaran untuk Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) pada tahun 2019. Meski demikian, proses integrasi Jamkesda ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap akan diberlakukan per 1 Januari 2019.

Anggota Komisi D DPRD Kota Yogya Dwi Budi Utomo, menjelaskan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2019, alokasi untuk jamkesda sudah dimunculkan. "Alokasi itu untuk menutup biaya yang tidak dikover oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sehingga pada tahun 2019 tetap ada alokasi untuk jamkesda meski sudah berintegrasi penuh ke JKN," tandasnya, Minggu (4/11).

Wujud integrasi Jamkesda ke JKN tersebut, imbuh Dwi Budi, ialah dengan mendaftarkan seluruh warga Kota Yogya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Dengan catatan, bagi yang bersedia dirawat di kelas III dan tidak naik kelas, maka iur atau premi bulannya menjadi tanggungan Pemkot Yogya. Total alokasi jamkesda pada 2019 juga tidak jauh berbeda dengan tahun ini yakni sebesar Rp 27 miliar, namun yang murni untuk membiayai yang tidak dikover oleh BPJS hanya Rp 5 miliar.

Dwi Budi menjelaskan, dalam rapat koordinasi terakhir dengan Dinas Kesehatan, pihaknya meminta agar Pemkot menghitung kembali perkiraan kebutuhan biaya. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan, alokasi jamkesda bisa bertambah dari usulan sementara. "Intinya jangan sampai dana itu nantinya justru kurang," jelasnya.

Dirinya mencontohkan, ada beberapa tindakan yang tidak bisa dikover oleh BPJS namun sangat dibutuhkan oleh pasien. Sehingga diperlukan jamkesda untuk mengkovernya. Seperti operasi mata yang mengharuskan pengadaan bagian mata. Tindakan operasi bisa dijamin oleh BPJS, namun untuk pengadaan bagian mata belum bisa dijamin sehingga akan dibiayai melalui jamkesda.

Di samping itu, warga yang belum memiliki identitas seperti gelandangan atau pengemis yang harus mendapatkan perawatan kesehatan, juga bisa diakomodir melalui jamkesda. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005